BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang, terus bergerak dalam upaya memberdayakan masyarakat. Perhatian tentang pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari adanya masalah kemiskinan dan masalah pendidikan yang masih terus mengancam. Dari data BPS Nasional Tahun 2017/2018 ditemukan bahwa masih ada sekitar 31, 123 ribu jumlah anak putus sekolah dan pada tahun 2018 masih terdapat 25, 95 juta orang penduduk miskin di Indonesia. Jika tidak mendapatkan penanganan secara cepat, maka tidak menutup kemungkinan angka kemiskinan dan putus sekolah dapat terus meningkat.

Solusi alternatif yang dapat digunakan dalam upaya memberdayakan masyarakat akibat ancaman kemiskinan dan masalah pendidikan adalah melalui jalur pendidikan Nonformal. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (1) menyatakan bahwa: Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Melalui jalur pendidikan nonformal, maka akan memberikan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik di Provinsi, Kabupaten, Desa/Kampung untuk dapat berdaya dan memanfaatkan semua potensi yang ada.

Kabupaten Berau merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi

Kalimantan Timur. Kabupaten Berau memiliki sumber daya alam yang melimpah serta bervariatif. Mulai dari hasil pertambangan, perkebunan perikanan hingga jasa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Berau atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2017. Bahwa pendapatan bruto tertinggi di antara seluruh lapangan usaha adalah dari hasil pertambangan dan penggalian.

Potensi hasil pertambagan batubara memikat masyarakat luar Kabupaten Berau untuk bertransmigrasi, terutama daerah yang mempunyai tingkat kesejahteraan rendah. Fenomena ini dapat dilacak melalui data Badan Pusat Statistik kabupaten Berau tentang laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2010 sebesar 179.079 naik pada tahun 2016 menjadi 214.828 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk secara drastis memberikan suatu konsekuensi logis yang harus diterima. Dampak positif yang muncul adalah percepatan pembagunan dan perkembangan daerah, karena informasi semakin banyak, melebarnya jaringan usaha dengan warga luar Kabupaten Berau, sehingga terjadi simbiosis mutualisme dan juga transformasi nilai. Namun dampak negatif yang harus diterima adalah ancaman kemiskinan serta pengangguran bagi masyarakat lokal karena persaingan kerja menjadi semakin ketat.

Ancaman kemiskinan pada daerah potensial (Berau) perlu diwaspadai. Data Badan Pusat Statistik kabupaten Berau menunjukkan bahwa, kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Berau dari tahun 2014 sebesar 9,77 ribu jiwa pada tahun 2017 meningkat menjadi 11, 47 jiwa, angka tersebut cukup menghawatirkan. Terutama bagi masyarakat lokal yang merasakan imbasnya.

Kondisi ini begitu ironi, mengingat potensi daerah yang besar namun hasilnya tidak dapat dinikmati langsung oleh masyarakat Kabupaten Berau secara menyeluruh. Menurut Sunyoto (2010: 128) kemiskinan pada persfektif situasional, masalah kemiskinan dilihat sebagai dampak dari sistem ekonomi yang mengutamakan akumulasi capital dan produk-produk teknologi modern. Berubahnya sistem perekonomian kabupaten Berau dengan bertumpu pada sektor perindustrian berdampak langsung terhadap masyarakat lokal kabupaten berau yang tidak memperoleh pendidikan yang baik.

Peran pendidikan sebagai instansi yang mempersiapkan masyarakat Kabupaten Berau untuk berdaya dan bekerja dapat terhambat karena akses serta kesempatan masyarakat yang tertutup. Akibat dari masalah pendidikan juga menyebabkan pengangguran. Jumlah pencari kerja yang diperoleh dari BPS Berau pada tahun 2017 tentang pencari kerja yang terdaftar menurut keadaan dan jenis kelamin sebanyak 5.367 jiwa. Belum terhitung pengangguran yang tidak tercatat di Dinas Ketenagakerjaan, tentu hasilnya bisa lebih besar. Hal ini merupakan masalah besar mengingat dampak yang ditimbulkan dari banyaknya pengangguran adalah menciptakan berbagai macam masalah, seperti: kriminalitas, konflik, dan kemiskinan.

Warga asli Kabupaten Berau banyak yang tinggal di daerah perkampungan. Dimana akses dan fasilitas pendidikan masih belum memadai, bahkan tidak adanya sekolah menengah atas/sederajat yang dibangun di daerah perkampungan. Akibatnya banyak masyarakat asli yang tidak mengenyam

pendidikan. Dari data Badan Pusat Stastik Kabupaten Berau ditemukan bahwa: angka partisipasi sekolah di Kabupaten Berau masih rendah.

Tabel 1. Angka Partisipasi Sekolah di Kabupaten Berau

Jenjang Pendidikan	2015		2016	
	APM	APK	APM	APK
SD/MI	112,43	97, 45	104, 35	92, 05
SMP/MTS	99, 29	87, 96	103, 77	81, 41
SMA/MAN	95, 21	71, 11	95, 07	66, 20

Sumber: BPS Kabupaten Berau Tahun 2016

Data di atas menunjukan bahwa angka partisipasi sekolah masyarakat, baik angka partisipasi kasar maupun murni di Kabupaten Berau pada pendidikan formal, khususnya pada jenjang SMA terus mengalami penurunan. Kurangnya sekolah menengah atas/sederajat diwilayah perkampungan Berau yang lokasinya jauh menyebabkan masyarakat berhenti dan memilih untuk langsung bekerja secara serabutan.

Masyarakat menggeluti berbagai profesi, mulai dari bertani, peternak, atau memilih mencari pekerjaan sebagai buruh kasar di Kota. Kondisi masyarakat perkampungan secara finansial belum cukup untuk meningkatkan kualitas hidupnya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan sosialnya. Keberadaan Perusahaan pertambangan batubara di beberapa wilayah, termasuk di perkampungan Berau yang seharusnya menjadi lahan pekerjaan masyarakat asli, tidak terjadi. Perusahaan membuat kebijakan kepada masyarakat untuk memiliki ijazah sebagai syarat untuk masuk perusahaan. Sedangkan masyarakat di perkampungan banyak yang tidak memiliki ijazah pada jenjang

SMA/sederajat.

Beberapa lembaga pendidikan nonformal di Kabupaten Berau berdiri sebagai bentuk empati dan semangat dalam upaya memberdayakan masyarakat lokal. Dari Jumlah data satuan pendidikan (sekolah) pendidikan masyarakat (dikmas) kabupaten/kota. Terdapat 45 satuan pendidikan masyarakat/pendidikan nonformal di Kabupaten Berau. Terhitung 25 jumlah LKP, 19 jumlah PKBM dan 1 SKB. Kontribusi satuan pendidikan nonformal sejauh ini dapat dilihat dari kinerja Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang aktif menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Berau, khususnya Program paket C. Dari pernyataan salah satu pegawai dinas pendidikan bidang pendidikan luar sekolah, bahwa jumlah peserta kegiatan paket C Pada tahun 2017 yang dilaksanakan sejak 15 dan 16 April Sebanyak 360 peserta, maka kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau masih terhitung tinggi terhadap pendidikan nonformal.

Masyarakat yang mengikuti program paket C sebagian besar adalah masyarakat yang putus sekolah karena akses yang sulit untuk melanjutkan pendidikan di Kota dan tidak adanya sekolah menengah atas/sederajat di wilayah perkampungan. Alasan lain masyarakat terkait dorongan kebutuhan, karena keinginan untuk melanjutkan pendidikan agar dapat bekerja di perusahaan pertambangan batubara maupun di perusahaan kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kualitas hidupnya. Menurut Kepala Bidang PAUD dan DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, ujian paket C memang bukan lagi di bawah kewenangan pihaknya, namun dilaksanakan oleh beberapa pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) yang ada di Kabupaten Berau. PKBM

sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan program pendidikan berbasis masyarakat, terutama di wilayah perkampungan Berau karena setiap tahunnya telah terbukti meluluskan ratusan peserta didik.

Lembaga pendidikan nonformal yang sampai saat ini masih aktif menyelenggarakan program PNF di Kabupaten Berau adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pusaka Indonesia. Setelah melakukan pengamatan awal di PKBM Pusaka Indonesia, diperoleh informasi melalui Dinas Pendidikan dan pengurus PKBM secara langsung, bahwa PKBM pusaka Indonesia adalah PKBM yang tetap aktif menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat di daerah perkampungan Berau. Pimpinan PKBM pusaka Indonesia mengatakan bahwa banyaknya permintaan masyarakat lokal melalui Kepala Kampung terhadap program paket kesetaraan, khususnya paket C, memberikan keberanian pengurus PKBM untuk menyelenggarakan program paket C di daerah perkampungan Berau. Selain itu penyelenggaraan proram paket C juga mendapatkan dukungan secara langsung dari pihak perusahaan yang beroperasi di sekitar Kampung Tumbit Dayak dan dukungan Pemerintah Kampung Tumbit Dayak. Dengan adanya bantuan dari berbagai pihak tentu meningkatkan optimisme pengurus PKBM Pusaka Indonesia dalam menyelenggarakan program.

Program paket C yang diselenggarakan PKBM Pusaka Indonesia masih harus dikaji secara lanjut, karena kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap pendidikan nonformal di Kabupaten Berau. Melalui wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Pendidikan pada bidang Pendidikan Masyarakat

diperoleh informasi bahwa perlu adanya data yang akurat dalam memberikan dukungan kepada PKBM ataupun lembaga pendidikan nonformal lainnya. PKBM harus memiliki berkas-berkas kegiatan, dokumentasi, kegiatan rutin, serta memiliki manfaat besar terhadap masyarakat. Selain itu, kurangnya koordinasi antara pengurus PKBM dengan Dinas Pendidikan ataupun sebaliknya sering memunculkan kesalahpahaman. Alasan lain adalah Dinas Pendidikan Bidang Pendidikan Luar Sekolah masih jarang menyelenggarakan evaluasi program terhadap PKBM. Selain itu, belum ada suatu penelitian Evaluasi yang dilakukan mengenai program PKBM di Kabupaten Berau dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pengamatan secara langsung, maka Peneliti fokus untuk melakukan evaluasi program paket C karena pertimbangan bahwa, program paket C yang dilaksanakan di Kampung Tumbit Dayak sejak tahun 2016 belum pernah di evaluasi secara menyeluruh oleh PKBM Pusaka Indonesia dan Pemerintah Daerah. Lalu memungkinkan adanya berkas, informan, serta dapat dikaji secara lengkap mulai dari aspek konteks, input, proses dan produknya. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah program sudah sesuai dengan standar pemerintah atau tidak, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan pertimbangan PKBM Pusaka Indonesia sendiri untuk menentukan kebijakan selanjutnya dan dapat menjadi bahan rekomendasi dalam menyelesaikan masalah PKBM atau lembaga lainnya yang ingin menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat. Maka peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi program paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dalam Pemberdayaan masyarakat di Kampung

Tumbit Dayak Kabupaten Berau dengan menggunakan model evaluasi C.I.P.P dari stufflebeam untuk mengetahui aspek-aspek secara spesifik dan komprehensif pada program paket C di Kampung Tumbit Dayak.

B. Deskripsi Program

PKBM Pusaka Indonesia merupakan satu di antara 19 PKBM yang ada di Kabupaten Berau yang tetap aktif menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat. Beberapa PKBM lain di Kabupaten Berau berstatus tidak aktif dan vakum karena masalah Anggaran, legalitas dan kurangnya strategi dalam mengelolah PKBM. Sehingga penting mengetahui strategi pengelolaan PKBM yang sudah aktif menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat.

Pada Tahun 2016-2018 untuk pertamakalinya PKBM Pusaka Indonesia mencoba menyelenggarakan program paket C di perkampungan Berau. Dimana akses untuk ke beberapa daerah perkampungan Berau masih sulit dan kurangnya dukungan Pemerintah Daerah, tetapi permintaan dari masyarakat yang diwakili oleh Kepala Kampung cukup tinggi.

Perlu adanya data-data lengkap yang dapat menjadi bahan pengambilan kebijakan untuk menentukan program paket C dalam pemberdayaan masyarakat berikutnya, serta sebagai bahan referensi Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan bagi lembaga pendidikan Nonformal yang secara administratif sudah memenuhi semua kriteria yang ditetapkan. Deskripsi program paket C di Kampung Tumbit Dayak akan dijelaskan secara rinci di bawah ini dengan melihat aspek-aspek yang menjadi bahan evaluasi.

1. Deskripsi Conteks

a. Faktor kebutuhan

Program paket C diselenggarakan atas masalah pendidikan yang dialami oleh masyarakat Kampung Tumbit Dayak. Peserta didik tidak melanjutkan sekolah karena tidak adanya SMA/Sederajat di Kampung Tumbit Dayak dan jauhnya sekolah di perkotaan. Selain itu masyarakat Tumbit Dayak masih memiliki masalah ekonomi, hasil pendapatan melalui jenis pekerjaan sebelumnya, belum menjamin kebutuhan pokok dan kebutuhan lain masyarakat terpenuhi, sedangkan ada jenis pekerjaan baru yang pendapatannya jauh lebih tinggi, yakni dengan pertambangan batubara. Penyelenggaraan program paket C berdasarkan potensi alam di Tumbit Dayak yang memiliki banyak kandungan batubara sehingga perusahaan beroperasi di wilayah tersebut dan hasilnya ingin dinikmati oleh penduduk sekitar. Masyarakat dengan kemauan sendiri mengikuti program paket C melalui bantuan Kepala Kampung yang telah melakukan dialog dengan masyarakat dan ingin menyampaikan aspirasi masyarakat di Kampung Tumbit Dayak.

b. Tujuan Program

Motif utama Peserta didik mengikuti program agar bisa mendapatkan ijazah paket C yang dapat digunakan sebagai syarat untuk bekerja di perusahaan. Peserta didik ingin mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati fasilitas lain dengan mendapatkan ijazah paket C. selain itu

Pengurus dan tutor menyatakan bahwa program paket C bukan hanya sebagai syarat untuk masuk ke perusahaan, tetapi diharapkan adanya perubahan peserta didik pada aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap paling utama sebagai bekal ketika bekerja.

2. Deskripsi Input

a. Silabus

Silabus yang dirancang oleh tutor menggunakan komponen (identitas mata pelajaran, Standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, Tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran) mengikuti peraturan pemerintah tentang standar proses paket C.

b. RPP

RPP disusun tutor dengan komponen (identitas mata pelajaran, Standar kompetensi, kompetensi dasar, indicator pencapaian kompetensi, Tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran) dengan mengacu pada peraturan pemerintah tentang standar proses paket C.

c. Tutor

Pengurus PKBM Pusaka Indonesia memilih tutor berdasarkan prosedur yang sudah disepakati dari hasil rapat. Kriteria pemilihan adalah dengan memperhatikan bidang keilmuwan tutor sesuai dengan mata pelajaran yang

diajarkan, lalu memperhatikan pengalaman tutor dengan melihat lamanya mengajar. Untuk tutor asal PKBM Pusaka Indonesia telah mengajar paket C mulai tahun 2013 sampai sekarang (2018). Setelah perekrutan Tutor, maka kemudian tutor merancang program sesuai dengan peraturan pemerintah tentang standar proses pelaksanaan program paket C.

d. Peserta Didik

Peserta didik adalah warga Asli Kampung Tumbit Dayak yang dipilih oleh kepala kampung secara langsung untuk diikutsertakan pada program paket C berdasarkan kemauan sendiri. Pada dokumen terdapat 114 laki-laki dan 86 perempuan yang mengikuti program dengan memperhatikan faktor keragaman.

e. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan bersifat situasional, karena meyesuaikan kondisi setempat. Kurikulum masih menggunakan KTSP, bukan k-13 karena belum ada sosialisasi dari pemerintah daerah terkait kurikulum 13. Sehingga standar yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang kurikulum KTSP.

f. Anggaran/dana,

Angaran diperoleh melalui bantuan perusahaan berupa dana, sarana prasarana. Lalu, Anggaran dikelola dengan mekanisme rapat dengan seluruh pengurus untuk menentukan penyaluran Anggaran.

g. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasaran disediakan oleh pihak perusahaan berupa gedung, fasilitas mengajar, kendaraan untuk tutor. Adanya sarana dan prasarana memudahkan tutor dalam menyajikan materi dan memberikan kenyamanan bagi peserta didik ketika proses belajar, karena gedung yang cukup luas, sejuk dan dapat menghindari dari terik panas. Pihak kampung dan perusahaan kemudian melakukan kontrol secara langsung terhadap sarana dan prasarana.

h. Relasi

Hubungan kerjasama dengan pihak perusahaan, terutama dengan induk perusahaan sudah terjalin sejak tahun 2013, sedangkan untuk anak perusahaam PT.PAMA mulai sejak penyelenggaraan program paket C di kampung Tumbit Dayak. Hubungan kerjasama yang cukup lama memberikan Perusahaan kepercayaan terhadap PKBM pusaka Indonesia untuk menyelenggarakan program paket C.

3. Deskripsi Proses

a. Syarat pelaksanaan pembelajaran

Peserta didik di dalam ruangan/kelas berjumlah 30 orang. Tutor memberikan pelajaran berdasarkan disiplin ilmu dan pengalaman mengajarnya dan tutorial dilakukan 2-3 kali perminggu. Sarana dan prasarana disediakan pihak Perusahaan dan pengurus kampung. Tutor

menggunakan buku teks pelajaran, artikel, modul dan peta konsep sesuai dengan syarat pelaksanaan pembelajaran dengan peraturan pemerintah tentang standar proses paket C.

b. Implementasi RPP

Implementasi RPP melalui: Absen tutor dan peserta didik, pemberian motivasi, penjelasan tentang pokok bahasan. Peserta didik mendengarkan penjelasan tutor terkait materi pembelajaran, lalu mengerjakan tugas sesuai dengan materi pembahasan, dan mengumpulkan tugas untuk dinilai. Ada pula refeleksi yang dilakukan tutor, pemberian tugas, mengadakan test, sama-sama menjawab hasil soal ujian untuk melihat proses perkembangan kemampuan peserta didik.

c. Pelaksanaan Program

Program terlaksana sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Peserta didik sangat antusias untuk belajar, rajin bertanya, dan terlihat riang mengikuti pembelajaran terutama dengan tutor yang memberikan peserta didik fleksibelitas. Proses belajar menjadi aktif, karena peserta didik jika tidak mengerti langsung bertanya. Peserta didik disiplin mengikuti pembelajaran dengan menaati peraturan PKBM. Pada proses pelaksanaan bimbingan karir bukan dari PKBM tetapi dari pihak perusahaan.

4. Deskripsi Produk

a. Ketercapaian Tujuan

Kepercayaan diri peserta didik meningkat, perubahan pada kedispilinan, bertambahnya pengetahuan serta keterampilan, setelah mendapatkan ijazah paket C, peserta didik diterima bekerja

b. Dampak Program

Peserta didik setelah bekerja mampu memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan keluarganya. Bahkan salah satu peserta didik memilih untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi.

C. Pembatasan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan deskripsi program yang sudah dipaparkan, maka permasalahan dibatasi pada evaluasi program paket C dengan melihat aspek konteks, input, proses dan produk.

D. Rumusan masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah difokuskan pada aspek konteks, input, proses dan produk yang dikaji melalui pendekatan kualitatif:

1. Bagaimana konteks program paket C dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Tumbit Dayak, Kabupaten Berau?
2. Bagaimana input Program paket C dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Tumbit Dayak, Kabupaten Berau?
3. Bagaimana proses program paket C dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Tumbit Dayak, Kabupaten Berau?

4. Bagaimana produk program paket C dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Tumbit Dayak, Kabupaten Berau?

E. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi penelitian program paket C dalam memberdayakan masyarakat diKampung Tumbit Dayak adalah sebagai berikut:

1. Memahami konteks program paket C dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Tumbit Dayak Kabupaten Berau?
2. Memahami input program paket C dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Tumbit Dayak Kabupaten Berau?
3. Memahami proses program paket C dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Tumbit Dayak Kabupaten Berau?
4. Memahami produk program program C dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Tumbit Dayak Kabupaten Berau?

F. Manfaat EvaIuasi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis maupun dunia pendidikan, khususnya pendidikan nonformal. Adapun manfaat yang di harapkan sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis
    a. Penelitian dapat menjadi referensi atau sebagai rujukan dalam pengembangan program-program pendidikan luar sekolah.
    b. Sebagai masukan dalam pengembangan disiplin keilmuan pendidikan luar sekolah untuk penelitian yang dilakukan di daerah Berau.

2. Manfaat Praktis

a. Evaluasi terhadap program paket C sebagai laboratorium mahasiswa pendidikan luar sekolah.

b. Memberikan informasi dan solusi dalam melaksanakan program melalui PKBM yang tepat sesuai kebutuhan peserta didik.

c. Hasil evaluasi menjadi bahan pengambilan keputusan apakah program dihentikan, dilanjutkan atau dimodifikasi.

d. Memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Berau maupun lembaga yang bergerak dalam dunia pendidikan dan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah/Pendidikan Nonformal untuk pengembangan program PNF.